

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)**

Silvi Oktaviani
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

ABSTRAK

The purpose of this research: (1) The effect of Application of Local Government Accounting System To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency; (2) Understanding of Accounting To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency; (3) compliance with laws and regulations To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency; (4) Work Motivation To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency.

This research is descriptive by using quantitative data analysis with causal research design. The data used in this study is the primary data in the form of questionnaires distributed throughout the organization of regional devices Kuantan Singingi Regency. The number of population this research was 161 people and the sample size was 78 people. Data analysis was done by using multiple linear regression method with the help of SPSS version 23 software. In this research uisnh 4 independent variables namely The effect of Application of Local Government Accounting System (X_1), Understanding of Accounting (X_2), compliance with laws and regulations (X_3), Work Motivation (X_4), and performance accountability (Y) as its dependent variable.

The results of this study indicatethat the Application of Local Government Accounting System has a positive and significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.281. Understanding of Accounting has a positive and significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.217. Unlike the utilization of compliance with laws and regulations has no significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.092. But Work Motivation has a positive and significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.166.

Keyword: Application of Local Government Accounting System, Understanding of Accounting, compliance with laws and regulations, Work Motivation, and performance accountability.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Menurut Halaman (2010:87) terwujudnya tata keuangan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya mendapatkan penilaian opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan penelitian Hasibuan (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Hasibuan (2017) memakai tiga variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan, sedangkan penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu motivasi kerja dengan memakai obyek yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Kuantan Singingi,. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya terkait dengan variabel penelitian dan obyek penelitian.

Yang pertama yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2011:223) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Hasil kedua mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pemahaman akuntansi. Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi.

Hal ketiga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yaitu ketaatan pada peraturan perundangan. Dengan adanya keataan pada peraturan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Hal keempat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yaitu motivasi kerja. Menurut Danang (2013:191) motivasi adalah suatu perangsang, keinginan, daya gerak dan kemauan bekerja seseorang setiap motif mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan organisasi atau perusahaan motivasi erat kaitannya dengan prestasi kerja yang dicapai. Prestasi kerja karyawan memiliki peranan penting kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Melihat pentingnya pengaruh motivasi, maka sepatutnya motivasi diberikan oleh setiap organisasi pemerintahan atau swasta.

Saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti akuntabilitas kinerja di kabupaten Kuantan Singingi karena saya ingin mengetahui seberapa besar tingkat Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah kabupaten tersebut, apakah sudah disajikan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan disusun sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi?
4. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan peraturan perundangan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Kuantan Singingi, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan memberikan informasi bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah.

3. Bagi Pembaca/Publik

Sebagai referensi perpustakaan, dan untuk penelitian berikutnya.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan dibidang pemerintahan, khususnya Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban

secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Menurut LAN (2003:3) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 64 tahun 2013 yakni: "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah".

2.1.3 Pemahaman Akuntansi

Menurut Riko (2006:75) pemahaman akuntansi adalah suatu proses pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

2.1.4 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dengan pengembangan tujuan laporan keuangan dan diakhiri dengan penurunan kerangka kerja konseptual atau konstitusi untuk digunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi.

2.1.5 Motivasi Kerja

Motivasi merupakan pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan (Bangun, 2012:312).

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Gede (2000:95) penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintahan.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian Sumiati (2012) yang berhasil membuktikan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sementara yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H_1 : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. (Rudianto, 2012:2).

Penelitian Yuliani, dkk (2010), menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Apriyani (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sementara yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H_2 : Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.2.3. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan.

Penelitian Soleman (2007) berpendapat ketaatan terhadap peraturan perundangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian Sumiati (2012), Riantiaro & Azlina (2011) dan Zirman, dkk (2010) berhasil membuktikan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sementara yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H_3 : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.2.4 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

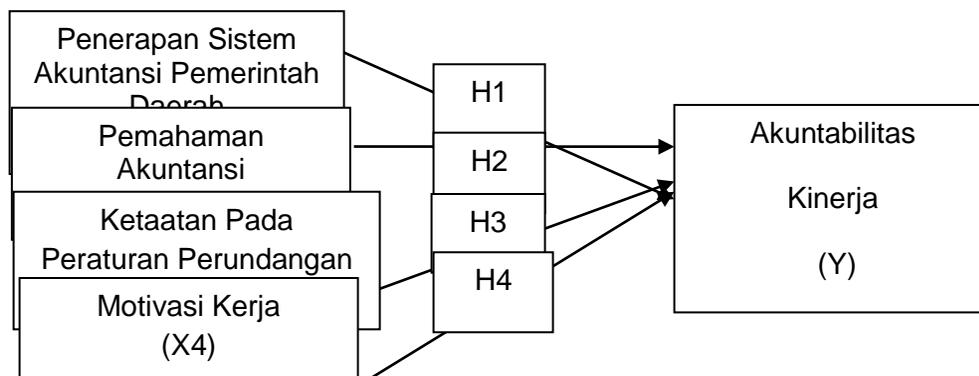
Menurut Soetrisno (2010) Motivasi adalah suatu pendorong yang dapat mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan dorongan (tenaga) tersebut merupakan gerak hati (jiwa) maupun jasmani untuk bertindak dan berbuat atau alasan yang melatar belakangi manusia berbuat sesuatu untuk mencapai keinginan dan tujuan. Dengan motivasi diharapkan setiap individu mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis sementara yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₄: Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Puspitasari (2014) dan Hasibuan (2017).

2.5 Hipotesis

H₁= Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

H₂= Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

H₃= Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

H₄= Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III METODE PENELITIAN

1.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh penetapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitiannya di jadwalkan mulai bulan Oktober 2018 sampai bulan April 2019.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga total populasi dalam penelitian ini berjumlah 161 orang.

3.3.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah pegawai pada organisasi perangkat daerah yang bekerja di bagian keuangan yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan dan dua orang staf atau pegawai bagian keuangan. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 78 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh secara langsung dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisioner guna mengumpulkan informasi dari obyek penelitian tersebut. Data bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan sistem akuntansi pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, motivasi kerja, dan akuntabilitas kinerja. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuisioner ke responden secara langsung yang terdiri dari bagian akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penulisan proposal ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner
Adapun isi kuesioner sebagai instrument penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas:
 - a) Profil responden, meliputi nama, nama instansi, jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir.
 - b) Daftar pertanyaan, meliputi pertanyaan mengenai indikator variabel penelitian. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka dan tertutup (Sugiyono, 2014:232).
2. Studi Kepustakaan
Penelitian dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoritis untuk melakukan pembahasan.
3. Mengakses data melalui website dan situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel. Variabel tersebut adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan, motivasi kerja, dan akuntabilitas kerja. Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen yang akan diukur dengan menggunakan skala likert.

3.6.2 Variabel Terikat Atau Dependen (*Dependent Variable*)

Menurut Efferin (2008:58) variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas atau independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja.

3.6.2.1 Akuntabilitas Kinerja (Y)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Suhartono & Solichin (2006) yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Setiap pertanyaan diukur dengan skala Likert 1-5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) setuju, (5) Sangat Setuju. Responden diminta menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

3.6.3 Variabel Bebas atau Independen (*Independet Variable*)

Menurut Sugiono (2014:96) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

3.6.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1)

Menurut Gede (2000:95) Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah penerapan sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintahan. Diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Sumiati (2012) dengan jumlah item pertanyaan adalah 12 item dengan skala Likert 1-5 yaitu terdiri dari: (1) Sangat Tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) setuju, (5) Sangat Setuju.

3.6.3.2 Pemahaman Akuntansi (X_2)

Pemahaman akuntansi adalah suatu kemampuan dari seorang pegawai atau karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang diadaptasi dari Arief (2012) yang terdiri dari 10 item pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) setuju, (5) Sangat Setuju. Responden diminta menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

3.6.3.3 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_3)

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Fatmala (2014) dengan jumlah 6 item pertanyaan dan skala Likert 1-5 yang meliputi: (1) Sangat Tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) setuju, (5) Sangat Setuju.

3.6.3.4 Motivasi Kerja (X_4)

Motivasi kerja merupakan suatu modal menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai saran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggungjawab (Hasihbuan, 2012:191). Diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Puspitasari (2014) dengan jumlah 12 item pertanyaan dan skala Likert 1-5 yang meliputi (1) Sangat Tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) setuju, (5) Sangat Setuju. Responden diminta menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrument berupa kuesioner atau angket (daftar pertanyaan) guna mengumpulkan data dari responden. Untuk mengukur variabel yang diteliti digunakan indikator atau item yang menggambarkan variabel yang diukur. Sedangkan skala dalam penelitian ini adalah skala Likert

Skala Likert yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, yakni memiliki alternative atau tingkatan jawaban sebagai berikut (Efferin, 2008:109):

- 1 = Sangat Tidak setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Sementara kriteria penilaian rata-rata nilai indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan sesuai skala Likert yang digunakan (Sugiyono. 2014:94):

- 1 – 2,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- 2 – 3,00 = Responden memiliki penilaian yang kurang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- 3 – 4,00 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
- 4 – 5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 78 jawaban kuesioner responden di Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi kriteria.

4.1.1 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1)

Tabel 4.7

Tanggapan Terhadap Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria
	STS	TS	KS	S	SS			
PSAPD 01	-	-	20.5%	59%	20.5%	100%	4.00	Baik
PSAPD 02	-	-	24.4%	52.5%	23.1%	100%	3.99	Baik
PSAPD 03	-	-	21.8%	60.2%	18%	100%	3.99	Baik
PSAPD 04	-	-	19.2%	57.7%	23.1%	100%	4.04	Baik
PSAPD 05	-	-	30.8%	51.2%	18%	100%	3.87	Baik
PSAPD 06	-	1.3%	32.1%	52.5%	14.1%	100%	3.79	Baik
PSAPD 07	-	-	29.5%	60.2%	10.3%	100%	3.81	Baik
PSAPD 08	-	-	16.7%	65.3%	18%	100%	4.01	Baik
PSAPD 09	-	-	19.3%	60.2%	20.5%	100%	4.01	Baik
PSAPD 10	-	-	21.8%	60.2%	18%	100%	3.96	Baik
PSAPD 11	-	-	20.5%	61.5%	18%	100%	3.96	Baik
PSAPD 12	-	-	19.2%	52.6%	28.2%	100%	4.08	Sangat Baik
Rata-Rata Variabel	3.95							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel sistem akuntansi pemerintah daerah dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item sistem akuntansi pemerintah daerah (PSAPD) sebesar 3.95. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori baik.

4.3.2 Pemahaman Akuntansi (X_2)

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pemahaman Akuntansi (X_2)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria
	STS	TS	KS	S	SS			
PA 01	-	-	21.8%	53.8%	24.4%	100%	4.04	Baik
PA 02	-	3.8%	24.4%	34.7%	37.1%	100%	4.05	Baik
PA 03	1.3%	1.3%	28.2%	47.4%	21.8%	100%	3.88	Baik
PA 04	-	2.5%	23%	48.8%	25.7%	100%	3.97	Baik
PA 05	-	6.4%	25.7%	37.1%	30.8%	100%	3.95	Baik
PA 06	-	6.4%	24.4%	47.4%	21.8%	100%	3.87	Baik
PA 07	-	1.3%	19.2%	52.5%	27%	100%	4.08	Sangat Baik
PA 08	-	2.5%	25.7%	51.3%	20.5%	100%	3.90	Baik
PA 09	-	-	38.5%	44.9%	16.6%	100%	3.79	Baik
PA10	-	2.5%	25.7%	47.4%	24.4%	100%	3.78	Baik
Rata-Rata Variabel	3.93							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Berdasarkan seluruh item yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman akuntansi dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item pemahaman akuntansi sebesar 3.93. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik.

4.3.3 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X₃)

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria
	STS	TS	KS	S	SS			
KPPP 01	-	-	23,1%	61,5%	15,4%	100%	3.92	Baik
KPPP 02	-	-	30,8%	59,0%	10,2%	100%	3.79	Baik
KPPP 03	-	2,6%	28,2%	60,2%	9,0%	100%	3.74	Baik
KPPP 04	-	3,9%	29,5%	55,1%	11,5%	100%	3.74	Baik
KPPP 05	-	2,6%	25,6%	51,3%	20,5%	100%	3.90	Baik
KPPP 06	-	5,2%	26,9%	47,4%	20,5%	100%	3.83	Baik
Rata-Rata Variabel	3.82							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel keataatan pada peraturan perundangan dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata variabel ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 3.82. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan ketaatan pada peraturan perundangan dalam penelitian ini adalah baik.

4.3.4 Motivasi Kerja (X₄)

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Motivasi Kerja (X₄)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria
	STS	TS	KS	S	SS			
MK 01	-	-	25.6%	57.7%	16.7%	100%	3.91	Baik
MK 02	-	-	21.8%	55.1%	23.1%	100%	4.01	Baik
MK 03	-	-	10.3%	70.5%	19.2%	100%	4.09	Sangat Baik
MK 04	-	-	12.9%	69.2%	17.9%	100%	4.05	Baik
MK 05	-	-	27%	55.1%	17.9%	100%	3.91	Baik
MK 06	-	1.3%	29.4%	44.9%	24.4%	100%	3.92	Baik
MK 07	-	-	20.5%	57.7%	21.8%	100%	4.01	Baik
MK 08	-	1.3%	19.2%	53.8%	25.7%	100%	4.03	Baik
MK 09	-	-	17.9%	62.9%	19.2%	100%	4.01	Baik
MK 10	-	-	15.4%	61.5%	23.1%	100%	4.09	Sangat Baik
MK 11	-	-	16.7%	55.1%	28.2%	100%	4.12	Sangat Baik
MK 12	-	-	20.5%	55.1%	24.4%	100%	4.04	Baik
Rata-Rata Variabel	4.01							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi kerja, maka diperoleh rata-rata sebesar 4.01. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa motivasi kerja adalah baik.

4.3.5 Akuntabilitas Kinerja (Y)

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria
	STS	TS	KS	S	SS			
AK 01	-	-	18%	53.8%	28.2%	100%	4.10	Sangat Baik
AK 02	-	-	14.1%	46.1%	39.8%	100%	4.26	Sangat Baik
AK 03	-	-	25.6%	47.4%	27%	100%	4.06	Sangat Baik
AK 04	-	-	16.6%	56.4%	27%	100%	4.10	Sangat Baik
AK 05	-	1.3%	14.1%	60.2%	24.4%	100%	4.08	Sangat Baik
AK 06	-	-	15.4%	52.5%	32.1%	100%	4.19	Sangat Baik
AK 07	-	-	9%	60.2%	30.8%	100%	4.21	Sangat Baik
AK 08	-	-	14.1%	47.4%	38.5%	100%	4.28	Sangat Baik
AK 09	-	-	24.4%	59%	16.6%	100%	3.92	Baik
AK10	-	-	18%	50%	32%	100%	4.19	Sangat Baik
Rata-Rata Variabel	4.13							Sangat Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

4.2 Hasil Pengujian Kualitas Data

4.2.1 Hasil Uji Validitas Data

Tabel 4.12
Rangkuman Hasil Pengujian Validitas

	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X ₁)	PSAPD 01	0.680	0.223	VALID
	PSAPD 02	0.762	0.223	VALID
	PSAPD 03	0.693	0.223	VALID
	PSAPD 04	0.581	0.223	VALID
	PSAPD 05	0.642	0.223	VALID
	PSAPD 06	0.791	0.223	VALID
	PSAPD 07	0.834	0.223	VALID
	PSAPD 08	0.738	0.223	VALID
	PSAPD 09	0.682	0.223	VALID
	PSAPD 10	0.816	0.223	VALID
	PSAPD 11	0.816	0.223	VALID
	PSAPD 12	0.729	0.223	VALID
Pemahaman Akuntansi (X ₂)	PA 01	0.508	0.223	VALID
	PA 02	0.878	0.223	VALID
	PA 03	0.679	0.223	VALID
	PA 04	0.739	0.223	VALID
	PA 05	0.872	0.223	VALID
	PA 06	0.848	0.223	VALID
	PA 07	0.752	0.223	VALID
	PA 08	0.768	0.223	VALID
	PA 09	0.756	0.223	VALID
	PA10	0.696	0.223	VALID
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X ₃)	KPPP 01	0.756	0.223	VALID
	KPPP 02	0.680	0.223	VALID
	KPPP 03	0.858	0.223	VALID
	KPPP 04	0.816	0.223	VALID
	KPPP 05	0.887	0.223	VALID
	KPPP 06	0.844	0.223	VALID
Motivasi Kerja (X ₄)	MK 01	0.766	0.223	VALID
	MK 02	0.762	0.223	VALID
	MK 03	0.542	0.223	VALID
	MK 04	0.558	0.223	VALID
	MK 05	0.778	0.223	VALID
	MK 06	0.802	0.223	VALID
	MK 07	0.767	0.223	VALID
	MK 08	0.619	0.223	VALID
	MK 09	0.727	0.223	VALID
	MK 10	0.695	0.223	VALID
	MK 11	0.740	0.223	VALID
	MK 12	0.755	0.223	VALID

	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
--	--------------------	--------------	-------------	------------

Akuntabilitas Kinerja (Y)	AK 01	0.613	0.223	VALID
	AK 02	0.788	0.223	VALID
	AK 03	0.691	0.223	VALID
	AK 04	0.707	0.223	VALID
	AK 05	0.670	0.223	VALID
	AK 06	0.590	0.223	VALID
	AK 07	0.556	0.223	VALID
	AK 08	0.553	0.223	VALID
	AK 09	0.539	0.223	VALID
	AK10	0.605	0.223	VALID

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2019

Pada Tabel 4.12 uji validitas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, motivasi kerja, dan akuntabilitas kinerja lebih besar disbanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, motivasi kerja, dan akuntabilitas kinerja dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>cronbach alpha</i>	N of Items	Kesimpulan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.920	12	Reliable
Pemahaman Akuntansi	0.916	10	Reliable
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0.893	6	Reliable
Motivasi Kerja	0.911	12	Reliable
Akuntabilitas Kinerja	0.834	10	Reliable

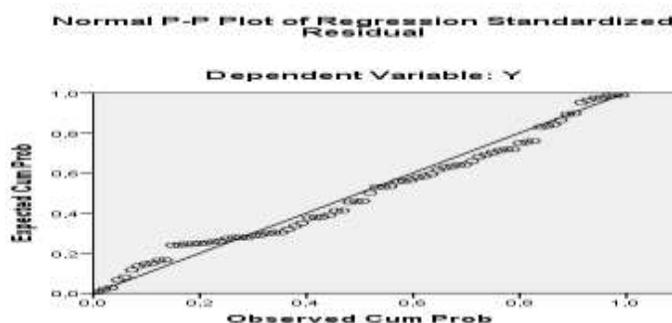
Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrument penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, motivasi kerja, dan akuntabilitas kinerja yang menunjukkan *cronbach alpha* yaitu 0.920 ; 0.916 ; 0.893 ; 0.911 ; 0.834. Dari lima variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa lima variabel dalam penelitian ini *reliable*.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.1
Normal Probability Standardized Residual



Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2019

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk uji normalitas dapat terpenuhi.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.14
Nilai Tolerance dan VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	0.210	4.769
	Pemahaman Aakuntansi (X2)	0.282	3.550
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	0.781	1.280
	Motivasi Kerja (X4)	0.251	3.982

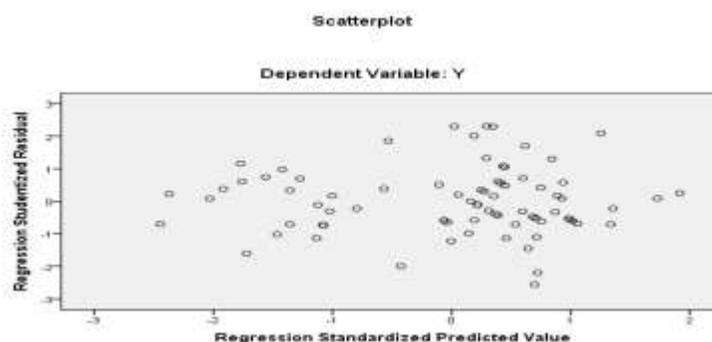
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa $VIF < 10$ untuk semua variabel bebas (independen), dan nilai *tolerance* juga < 0.10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas (independen) dalam model regresi.

4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.2
Scatter Plot



Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pernyataan menyebar dan tidak memperlihatkan pola tertentu *Scatter Plot* yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi penelitian ini baik.

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.15
Statistik Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.887 ^a	.787	.775	1.986	1.851

a. Predictors: (Constant), MK (X4), KPPP (X3), PA (X2), SAPD (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2019

Data tabel diatas dapat dilihat bahwa statistik *Durbin-Watson* sebagai output SPSS versi 23.00 sebesar 1.851.

Hal ini telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokolerasi atau tidak terdapat autokolerasi yaitu berkisar antara -2 sampai +2.

4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja

α = Konstanta

X₁ = Variabel independen 1 (Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah)

X₂ = Variabel independen 2 (Pemahaman Akuntansi)

X₃ = Variabel independen 3 (Ketaatan pada Peraturan Perundangan)

X₄ = Variabel independen 4 (Motivasi Kerja)

$\beta_{(1,2,3,4)}$ = Koefisien Regresi masing-masing variabel independen

e = Error Term, yaitu kesalahan regresi

Tabel 4.16
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	9.407	2.230	
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	.281	.087	.381
Pemahaman Akuntansi (X2)	.217	.072	.305
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	.092	.076	.074
Motivasi Kerja (X4)	.166	.081	.221

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu sebagai berikut:

$$Y = 9.407 + 0.281X_1 + 0.217X_2 + 0.092X_3 + 0.166X_4 + e$$

- α = 9.407 adalah apabila variabel independen dianggap konstan, maka akuntabilitas kinerja sebesar 9.407.
- β_1 = 0.281 adalah bahwa setiap peningkatan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkat akuntabilitas kinerja sebesar 0.281.
- β_2 = 0.217 adalah bahwa setiap peningkatan pemahaman akuntansi sebesar 1 satuan maka akan meningkat akuntabilitas kinerja sebesar 0.217.
- β_3 = 0.092 adalah bahwa setiap peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 1 satuan maka akan meningkat akuntabilitas kinerja sebesar 0.092.
- β_4 = 0.166 adalah bahwa setiap peningkatan motivasi kerja sebesar 1 satuan maka akan meningkat akuntabilitas kinerja sebesar 0.166.
- e = merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar error (e) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak di masukkan dalam persamaan.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Tabel 4.17
Uji T

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		4.219	.000
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	.381	3.234	.002
Pemahaman Akuntansi (X2)	.305	2.999	.004
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	.074	1.208	.231
Motivasi Kerja (X4)	.221	2.049	.044

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Hasil hipotesis uji t dapat dilihat pada rangkuman tabel 4.18 di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t

Hipotesis	T hitung	T tabel	Sig.	Kesimpulan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	3.234	1.993	0.002 < 0.05	H₁ Diterima
Pemahaman Akuntansi (X2)	2.999	1.993	0.004 < 0.05	H₂ Diterima
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	1.208	1.993	0.231 > 0.05	H₃ Ditolak
Motivasi Kerja (X4)	2.049	1.993	0.044 < 0.05	H₄ Diterima

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

4.5.2 Hasil Pengujian R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4.19
Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.887 ^a	.787	.775	1.986

a. Predictors: (Constant), MK (X4), KPPP (X3), PA (X2), SAPD (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 4.18 diatas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.775. Artinya sumbangan pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 77.5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Angka koefisien kolerasi (R) pada tabel sebesar 0.887 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat karena memiliki nilai kolerasi 0.05. *Standar Error of the Estimate* (SEE) sebesar 1.986 makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa t hitung > t tabel yaitu 3.234 > 1.993 dengan signifikansi sebesar 0.002 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut terdapat keputusan adalah H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Hasil dalam pengujian hipotesis pertama mendukung penelitian Sumiati (2012) bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Kabupaten Siak. Penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD pemerintah Aceh. Oleh karena itu, jika sistem akuntansi pemerintah daerah diterapkan dengan benar maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang dibuat.

4.6.2 Pengaruh Pemahaman AKuntansi (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.999 > 1.993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.004 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua mendukung penelitian Yuliani, dkk (2010) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Apriyani (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada pemerintah Kota Yogyakarta.

4.6.3 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.208 < 1.993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.231 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. dari hasil pengujian tersebut maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lumenta, dkk (2016) ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian S. Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kota Pekanbaru.

4.6.4 Pengaruh Motivasi Kerja (X4) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.049 > 1.993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.044 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Zirman, dkk (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kota Pekanbaru. Menurut penelitian Febriani (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Kota Yogyakarta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.281. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.
2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.217. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pemahaman akuntansi dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja.
3. Ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.092.
4. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.166. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat motivasi kerja dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan pemerintah agar selalu memperhatikan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, motivasi kerja agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin baik dan pemerintah juga harus menegakkan ketaatan pada peraturan perundangan yang ada untuk memudahkan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian. Hal ini diperlukan untuk generalisasi hasil yang diperoleh.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel lain yang juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Sehingga semakin banyak variabel penelitian yang diteliti maka akan semakin banyak pengetahuan kita mengenai variabel-variabel yang terkait dengan akuntabilitas kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul, Hafiz Tanjung. 2007. *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Anthony dan Govindajaran. 2005. *Manajemen Control System edisi 11 buku 2*, penerjemah: Drs. F.X. Kurniawan Tjakrawala, Msi, Ak. Dan Krista, SE, Ak. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardianto, Elvinaro. 2014. *Metedologi Penelitian untu Public Relations Kuantitaif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Efferin, Sukojo, Darmadji, Stevanus, Hadi. dan Tan, Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21. Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Salemba Empat*. Jakarta. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Program Strata Satu*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Hasibuan, Melayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Media Akuntansi Sktor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta.
- Muhammad Gade. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rudianto. 2012, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.
- UNIKS. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi*. Teluk Kuantan. Universitas Islam Kuantan Singingi.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Darwanis dan Sephi Chairunnisa, 2013. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal telaah & riset akuntansi*, Vol. 6, No. 2.
- Hasibuan, Janny, Rahmi. 2017. *Pengaruh Perapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah Pada SKPD Padang Lawas. Jurnal Akuntansi*. Vol 6. No 3.
- Puspitasari, Rita. 2014. *Pengaruh Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada SKPD Magelang. Jurnal Akuntansi* Vol 6. No 1.
- Sumiati. 2012. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Siak. Jurnal Akuntansi*. Vol 2. No 2.
- Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi, 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi*. Vol. 18, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- LAN, 2003. *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya*.